

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Menurut Permenkes No. 43 tahun 2019 puskesmas adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perseorangan tingkat pertama, dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif di wilayah kerjanya. Puskesmas memiliki peran yang sangat vital saat adanya ketentuan BPJS di tahun 2014. Peningkatan pelayanan puskesmas harus didukung dengan adanya kewenangan yang lebih luas dalam mengelola keuangan berupa pendapatan.

Puskesmas yang ingin berkembang sudah semestinya melakukan perbaikan, perbaikan yang dilakukan biasanya berkaitan dengan kinerja puskesmas. Faktor yang mempengaruhi kinerja dalam puskesmas ialah sumber daya manusia, sarana prasarana, serta dukungan dari dinas kesehatan, dan pemerintah.

Menurut Permenkes Republik Indonesia No.44 tahun 2016 penilaian kinerja puskesmas adalah suatu proses yang obyektif dan sistematis dalam mengumpulkan, menganalisis dan menggunakan informasi untuk menentukan seberapa efektif dan efisien pelayanan Puskesmas disediakan, serta sasaran yang dicapai sebagai penilaian hasil kerja/prestasi Puskesmas. Penilaian Kinerja Puskesmas dilaksanakan oleh Puskesmas dan kemudian hasil penilaiannya akan diverifikasi oleh dinas kesehatan kabupaten/kota. Tujuan dilaksanakannya penilaian kinerja adalah agar puskesmas:

1. Mendapatkan gambaran tingkat kinerja Puskesmas (hasil cakupan kegiatan, mutu kegiatan, dan manajemen Puskesmas) pada akhir tahun kegiatan.
2. Mendapatkan masukan untuk penyusunan rencana kegiatan di tahun yang akan datang.
3. Dapat melakukan identifikasi dan analisis masalah, mencari penyebab dan latar belakang serta hambatan masalah kesehatan di wilayah kerjanya berdasarkan adanya kesenjangan pencapaian kinerja.

4. Mengetahui dan sekaligus dapat melengkapi dokumen untuk persyaratan akreditasi Puskesmas.
5. Dapat menetapkan tingkat urgensi suatu kegiatan untuk dilaksanakan segera

Puskesmas perlu melakukan penilaian kinerja salah satunya yaitu penilaian kinerja keuangan, penilaian ini bertujuan untuk mengetahui keadaan keuangan yang terjadi dalam Puskesmas. Penerapan penilaian kinerja keuangan memungkinkan puskesmas untuk meningkatkan pendapatan dengan cara meningkatkan pelayanannya serta mendorong efisiensi dan efektivitas belanja. Berdasarkan uraian diatas penulis tertarik untuk menulis tugas akhir dengan judul “Analisis Rasio Keuangan Dalam Menilai Kinerja Keuangan Puskesmas ABCD”.

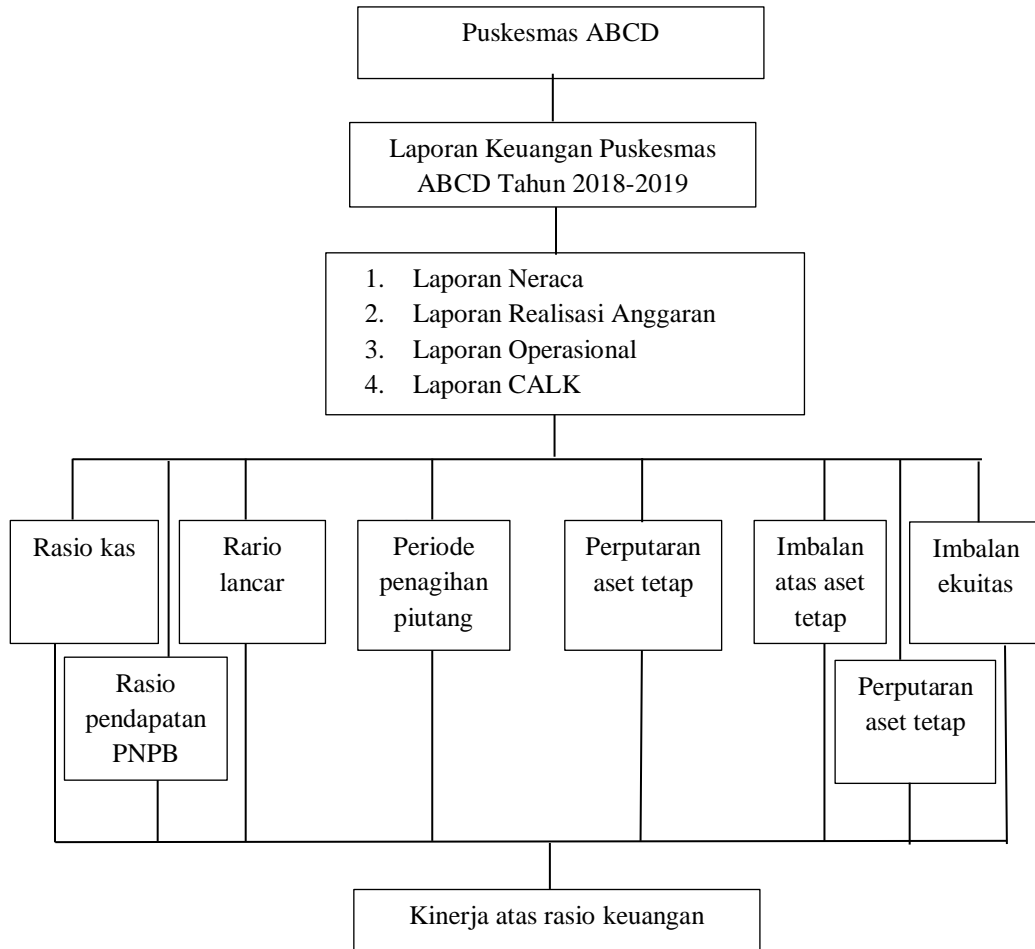
1.2 Tujuan

Laporan tugas akhir ini memiliki tujuan:

1. Mengetahui kinerja keuangan Puskesmas ABCD dengan menggunakan Rasio kinerja keuangan yang sesuai dengan Peraturan Direktur Jendral Perbendaharaan Nomor Per 36/PB/2016.
2. Mengetahui perkembangan kinerja keuangan Puskesmas ABCD untuk periode 2018 dan 2019.

1.3 Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran analisis kinerja keuangan puskesmas ABCD.



Gambar 1. Kerangka pemikiran

1.4 Kontribusi

Laporan Tugas Akhir ini diharapkan dapat bermanfaat bagi:

1. Penulis

Penyusunan tugas akhir ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi penulis yaitu dapat menerapkan ilmu akuntansi yang telah di peroleh dari Politeknik Negeri Lampung.

2. Pembaca

Tulisan ini diharapkan dapat menambah pengetahuan pembaca di bidang akuntansi terutama tentang penilaian kinerja dengan menggunakan rasio keuangan.

3. Puskesmas

Tulisaan ini diharapkan dapat digunakan untuk bahan pertimbangan atau saran dalam menilai kinerja keuangan puskesmas.

II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Laporan keuangan

2.1.1 Pengertian Laporan Keuangan

Menurut Munawir (2004) laporan keuangan adalah dua daftar yang disusun akuntan pada akhir periode suatu perusahaan. Kedua daftar itu adalah neraca atau daftar posisi keuangan dan daftar pendapatan atau daftar rugi laba. Menurut Munawir (2004) secara umum metode analisis laporan keuangan dapat diklasifikasikan menjadi dua yaitu :

1. Metode analisis horizontal (*dinamis*) merupakan metode analisis yang dilakukan dengan cara membandingkan laporan keuangan untuk beberapa periode, sehingga dapat diketahui perkembangan dan kecenderungannya. Disebut metode analisis dinamis karena metode ini bergerak dari tahun ke tahun. Teknik – teknik analisis yang termasuk dalam klasifikasi dalam metode ini adalah teknik analisis perbandingan, analisis trend (*index*) analisis sumber dan penggunaan dana, serta analisis perubahan laba kotor.
2. Metode analisis vertikal (*statis*) adalah metode analisis yang dilakukan dengan cara menganalisis laporan keuangan pada tahun tertentu, yaitu dengan cara membandingkan antara pos yang satu dengan pos lainnya pada laporan keuangan yang sama pada tahun yang sama. Oleh karena itu membandingkan pos yang satu dengan yang lainnya pada laporan yang sama maka disebut vertikal dan disebut statis karena metode ini hanya membandingkan pos – pos laporan keuangan pada tahun yang sama. Teknik – teknik yang termasuk pada klasifikasi metode ini adalah teknik analisis persentase perkomponen (*common size*), analisis rasio, dan analisis impas.

2.1.2 Tujuan laporan keuangan

Menurut Rudianto (2012) tujuan laporan keuangan adalah menyediakan informasi tentang posisi keuangan, kinerja keuangan, dan laporan arus kas suatu entitas yang bermanfaat bagi sejumlah besar pengguna dalam pengambilan keputusan ekonomi atatu siapapun yang tidak dalam posisi

dapat meminta laporan keuangan khusus untuk memenuhi kebutuhan informasi tertentu.

2.2 Rasio Keuangan

2.2.1 Pengertian Rasio Keuangan

Rasio keuangan merupakan kegiatan membandingkan angka-angka yang ada dalam laporan keuangan dengan cara membagi satu angka dengan angka lainnya Kasmir (2016). Rasio keuangan meliputi pengukuran terhadap:

- a. Rasio kas (*cast ratio*), yang digunakan untuk melihat perbandingan antara kas dan setara kas dengan kewajiban jangka pendek;
- b. Rasio lancar (*current ratio*), yang digunakan untuk melihat perbandingan antara aset lancar dengan kewajiban jangka pendek;
- c. Periode penagihan piutang (*collecting periode*) yang digunakan untuk melihat perbandingan piutang usaha dengan pendapatan usaha dalam satu tahun;
- d. Perputaran aset tetap *fixed asset turn over*, yang digunakan untuk melihat perbandingan antara pendapatan operasional dengan aset tetap;
- e. Imbalan atas aset tetap (*return on fixed asset*), untuk melihat perbandingan antara surplus/defisit sebelum pos keuntungan/kerugian, tidak termasuk pendapatan investasi yang bersumber dari APBN, ditambah biaya penyusutan, dengan nilai perolehan aset tetap tidak termasuk konstruksi pengerjaan;
- f. Imbalan ekuitas (*return of equity*), yang digunakan untuk melihat perbandingan antara surplus/defisit sebelum pos keuntungan/kerugian, tidak termasuk pendapatan investasi yang bersumber dari APBN, ditambah biaya penyusutan, dengan ekuitas setelah dikurangi surplus/defisit tahun berjalan;
- g. Perputaran persediaan (*inventory turn over*) yang digunakan untuk melihat perbandingan antara jumlah total persediaan dengan pendapatan usaha;

- h. Rasio Pendapatan PNPB terhadap biaya operasional, yang digunakan untuk melihat perbandingan antara penerimaan PNPB dengan biaya operasional; dan

2.2.2 Penilaian Indikator Apek Keuangan

- a. Rasio kas (*Cash Ratio*)

Rumus :

$$\frac{\text{Kas dan setara kas}}{\text{kewajiban jangka pendek}} \times 100\%$$

Penjelasan menurut Peraturan Direktur Jendral Perbendaharaan Nomor Per 36/PB/2016:

- 1) Kas adalah uang tunai atau saldo bank yang setiap saat dapat digunakan untuk membiayai BLU, Tidak termasuk saldo bank pada rekening dana kelolaan (Jamkesda/BPJS) yang brelum menjadi hal BLU.
- 2) Setara kas (*cash equivalent*) merupakan bagian dari aset lancar yang sangat liquid, yang dapat dikonveksi menjadi kas dalam jangka waktu 1 sampai 3 bulan tanpa menghadapi risiko perubahan nilai yang signifikan, tidak termasuk piutang dan persediaan. Contoh setara kas antara lain deposito berjangka kurang dari 3 bulan dan cek yang jatuh tempo kurang dari 3 bulan.
- 3) Kewajiban jangka pendek merupakan kewajiban yang diharapkan akan dibayar/diselesaikan atau jatuh tempo dalam waktu 12 bulan setelah tanggal neraca.

Tabel 1. Skor rasio kas adalah sebagai berikut:

Rasio Kas (%) (RK)	skor
RK > 480	0,25
420 < RK ≤ 480	0,5
360 < RK ≤ 420	1
300 < RK ≤ 360	1,5
240 < RK ≤ 300	2
180 < RK ≤ 240	1,5
120 < RK ≤ 180	1
60 < RK ≤ 120	0,5
0 < RK ≤ 60	0,25
RK = 0	0

Sumber : Peraturan Direktur Jendral Perbendaharaan Nomor Per 36/PB/2016

Contoh perhitungan :

BLU A mempunyai rasio kas sebesar 380%, maka skor untuk rasio kas BLU A adalah 1.

b. Rasio lancar (*Current Ratio*)

Rumus:

$$\frac{\text{Aset lancar}}{\text{kewajiban jangka pendek}} \times 100\%$$

Penjelasan menurut Peraturan Direktur Jendral Perbendaharaan Nomor Per 36/PB/2016:

- 1) Aset diklasifikasikan ke dalam aset lancar dan non lancar. Suatu aset diklasifikasikan sebagai aset lancar, jika aset tersebut:
 - a) Diperkirakan akan direalisasi atau dimiliki untuk dijual atau digunakan dalam jangka waktu 12 bulan setelah tanggal neraca.
 - b) Dimiliki untuk di perdgangkan atau untuk tujuan jangka pendek dan diharapkan akan direalisasi dalam jangka waktu 12 bulan dari tanggal neraca,
 - c) Berupa kas atau setara kas yang penggunaannya tidak dibatasi
- 2) Aset lancar antara lain meliputi kas dan setara kas, investasi jangka pendek, piutang usaha, piutang lain-lain, persediaan, uang muka, dan biaya dibayar dimuka, tidak termasuk saldo bank pada

rekening dana kelolaan (Jamkesda/BPJS) yang belum menjadi BLU.

- 3) Kewajiban jangka pendek merupakan kewajiban yang diharapkan akan dibayar/diselesaikan atau jatuh tempo pada waktu 12 bulan setelah tanggal neraca.

Tabel 2. Skor rasio lancar adalah sebagai berikut:

Rasio Lancar (%) (RL)	Skor
RL > 600	3
480 < RL ≤ 600	2,5
360 < RL ≤ 480	2
240 < RL ≤ 360	1,5
120 < RL ≤ 240	1
0 < RL ≤ 120	0,5
RL = 0	0

Sumber : Peraturan Dirjen pembendaharaan No Per/36/PB/2016

Contoh perhitungan :

BLU A mempunyai rasio lancar sebesar 480%, maka skor untuk rasio lancar BLU A adalah 2.

- c. Periode penagihan piutang (*collection period*)

Rumus:

$$\frac{\text{piutang usaha} \times 360}{\text{pendapatan usaha}} \times 1 \text{ hari}$$

Penjelasan:

- 1) Piutang usaha adalah hak yang timbul dari penyerahan barang atau jasa dalam rangka kegiatan operasional BLU.
- 2) Pendapatan usaha merupakan PNPB BLU yang diperoleh sebagai imbalan atas barang/jasa yang diserahkan kepada masyarakat.

Tabel 3. Skor periode penagihan piutang adalah sebagai berikut:

Periode Penagihan Piutang (hari) (PPP)	Skor
PPP < 30	2
30 ≤ PPP < 40	1,5
40 ≤ PPP < 60	1
60 ≤ PPP < 80	0,5
80 ≤ PPP < 100	0,25
PPP ≥	0

Sumber : Peraturan Dirjen Perbendaharaan No Per/36/PB/2016

Contoh perhitungan:

BLU A mempunyai periode penagihan piutang 25 hari, maka skor untuk rasio periode penagihan piutang BLU A adalah 2.

d. Perputaran Aset Tetap (*fixed asset turnover*)

Rumus:

$$\frac{\text{pendapatan operasional}}{\text{Aset tetap}} \times 100\%$$

Penjelasan:

- 1) Pendapatan operasional merupakan PNBP BLU yang diperoleh sebagai imbalan atas barang/jasa yang diserahkan kepada masyarakat, hasil kerja sama dengan pihak lain, sewa, jasa lembaga keuangan, dan lain-lain pendapatan yang tidak berhubungan secara langsung dengan pelayanan BLU, tidak termasuk pendapatan yang berasal dari (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) APBN dan hibah.
- 2) Aset tetap dihitung berdasarkan nilai perolehan aset tetap dikurangi konstruksi dalam pengerjaan.

Tabel 4. Skor rasio perputaran aset tetap adalah sbagai berikut:

Perputaran Aset Tetap (%) (PAT)	Skor
PAT > 20	2
15 < PAT ≤ 20	1,5
10 < PAT ≤ 15	1
5 < PAT ≤ 10	0,5
0 < PAT ≤ 5	0,25
PAT = 0	0

Sumber : Peraturan Dirjen Perbendaharaan No Per/36/PB/2016

Contoh perhitungan:

BLU A mempunyai rasio perputaran aset tetap 22%, maka skor untuk rasio perputaran aset tetap BLU A adalah 2.

e. Imbalan atas aset tetap (*Return on fixed asset*)

Rumus:

$$\frac{\text{Surplus atau Defisit Sebelum Pos Keuntungan atau Kerugian}}{\text{Aset tetap}} \times 100\%$$

Penjelasan menurut Peraturan Direktur Jendral Perbendaharaan Nomor Per 36/PB/2016:

- 1) Surplus/defisit sebelum pos keuntungan/kerugian adalah surplus/defisit sebelu pos keuntungan/kerugian, tanpa memperhitungkan pendapatan investasi yang bersumber dari APBN dan biaya penyusutan.
- 2) Aset tetap adalah nilai perolehan aset tetap tanpa memperhitungkan kontruksi dalam pengerjaan.

Tabel 5. Skor rasio imbalan atas aset tetap adalah sebagai berikut:

<i>Return on Fixed Asset (%)</i> (ROFA)	Skor
ROFA > 6	2
5 < ROFA ≤ 6	1,7
4 < ROFA ≤ 5	1,4
3 < ROFA ≤ 4	1,1
2 < ROFA ≤ 3	0,8
1 < ROFA ≤ 2	0,5
0 ≤ ROFA ≤ 1	0

Sumber : Peraturan Dirjen Perbendaharaan No Per/36/PB/2016

Contoh perhitungan:

BLU A mempunyai rasio imbalan atas aset tetap 5,5%, maka skor untuk rasio imbalan aset tetap BLU A adalah 1,7.

f. Imbalan Ekuitas (*Return on Equity*)

Rumus:

$$\frac{\text{Surplus atau Defisit Sebelum Pos Keuntungan atau Kerugian}}{\text{Ekuitas} - \text{Surplus atau Defisit sebelum Pos Keuntungan atau Kerugian}} \times 100\%$$

Penjelasan menurut Peraturan Direktur Jendral Perbendaharaan Nomor Per 36/PB/2016:

- 1) Surplus /defisit sebelum pos keuntungan/kerugian adalah surplus/defisit sebelum pos keuntungan/kerugian, tanpa memperhitungkan pendapatan investasi yang bersumber dari APBN dan biaya penyusutan.
- 2) Ekuitas adalah selisih antara hak residual BLU atas aset dengan seluruh kewajiban yang dimiliki.

Tabel 6. Skor rasio imbalan ekuitas adalah sebagai berikut:

<i>Return on equity (%)</i> (ROE)	Skor
ROE > 8	2
7 < ROE ≤ 8	1,8
6 < ROE ≤ 7	1,6
5 < ROE ≤ 6	1,4
4 < ROE ≤ 5	1,2
3 < ROE ≤ 4	1
2 < ROE ≤ 3	0,8
1 < ROE ≤ 2	0,6
0 < ROE ≤ 1	0,4
ROE = 0	0

Sumber : Peraturan Dirjen Pembendaharaan No Per 36/PB/2016

Contoh perhitungan:

BLU A mempunyai rasio imbalan ekuitas sebesar 6,5%, maka skor untuk rasio imbalan ekuitas BLU A adalah 1,6.

g. Perputaran persediaan (*Inventory Turnover*)

Rumus:

$$\frac{\text{Total Persediaan} \times 365}{\text{Persediaan BLU}} \times 1 \text{ hari}$$

Penjelasan menurut Peraturan Direktur Jendral Perbendaharaan Nomor Per 36/PB/2016:

- 1) Total persediaan adalah seluruh barang persediaan yang dimiliki oleh rumah sakit sebagaimana diatur dalam PSAP No. 05 Paragraf 05.
- 2) Pendapatan BLU merupakan pendapatan BLU yang terdiri atas pendapatan yang diperoleh sebagai imbalan atas barang/jasa yang diserahkan pada masyarakat termasuk pendapatan sewa, jasa lembaga keuangan, dan lain-lain pendapatan yang tidak berhubungan secara langsung dengan pelayanan BLU, termasuk pendapatan yang berasal dari APBN.

Tabel 7. Skor rasio perputaran persediaan adalah sebagai berikut:

Perputara Persediaan (hari) (PP)	Skor
ROE > 60	0
55 < ROE ≤ 60	0,5
45 < ROE ≤ 55	1
35 < ROE ≤ 45	1,5
30 < ROE ≤ 35	2
25 < ROE ≤ 30	1,5
15 < ROE ≤ 25	1
5 < ROE ≤ 15	0,5
0 < ROE ≤ 5	0

Sumber : Peraturan Dirjen Perbendaharaan N0 Per 36/PB/2016

Contoh perhitungan:

BLU A merupakan rasio perputaran persediaan 23 hari, maka skor untuk rasio perputaran persediaan BLU A adalah 1.

h. Rasio Pendapatan PNBPN terhadap Biaya Operasional

Rumus:

$$\frac{\text{Pendapatan PNBPN}}{\text{Biaya Operasional}} \times 100\%$$

Penjelasan:

- 1) Pendapatan PNBPN merupakan pendapatan yang diperoleh sebagai imbalan atas barang/jasa yang diserahkan pada masyarakat termasuk pendapatan yang berasal dari hibah, hasil kerjasama dari pihak lain, sewa, jasa lembaga keuangan, dan lain-lain pendapatan yang tidak berhubungan secara langsung dengan pelayanan BLU, tidak termasuk pendapatan yang berasal dari APBN.
- 2) Biaya operasional merupakan seluruh biaya yang dibutuhkan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, yang terdiri dari belanja pegawai dan belanja barang, dan sumber dananya berasal dari penerimaan anggaran APBN dan pendapatan PNBPN BLU, tidak termasuk biaya penyusutan.

Tabel 8. Skor rasio pendapatan PNBPN terhadap biaya operasional

Rasio PNBPN terhadap Biaya Operasional (%) (PB)	Skor
$PB > 65$	4
$57 < PB \leq 65$	3,5
$50 < PB \leq 57$	3
$42 < PB \leq 50$	2,5
$35 < PB \leq 42$	2
$28 < PB \leq 35$	1,5
$0 < PB \leq 28$	1

Sumber : Peraturan Dirjen Perbendaharaan No Per/36/PB/2016

Contoh perhitungan:

BLU A mempunyai rasio pendapatan PNBPN terhadap biaya operasional tahun anggaran 2015 sebesar 62%, maka skor untuk rasio kas BLU A adalah 2,25.

2.3 Kinerja Keuangan

Kinerja keuangan merupakan hasil atau prestasi yang telah dicapai oleh manajemen perusahaan dalam menjalankan fungsinya mengelola aset perusahaan secara efektif selama periode tertentu (Rudianto, 2013 dalam suraini). Penilaian Kinerja Puskesmas adalah suatu proses yang obyektif dan sistematis dalam mengumpulkan, menganalisis dan menggunakan informasi untuk menentukan seberapa efektif dan efisien pelayanan Puskesmas disediakan, serta sasaran yang dicapai sebagai penilaian hasil kerja/prestasi Puskesmas. Penilaian Kinerja Puskesmas dilaksanakan oleh Puskesmas dan kemudian hasil penilaiannya akan diverifikasi oleh dinas kesehatan kabupaten/kota. Dengan perbaikan kinerja diharapkan puskesmas dapat mengalami pertumbuhan keuangan yang lebih.

Menurut Peraturan Direktur Jendral Perbendaharaan Nomor Per-36/PB/2016 Skor penilaian kinerja pada aspek rasio keuangan adalah sebagai berikut:

Tabel 9. Skor penilaian kinerja pada aspek rasio keuangan

No.	Subaspek/Indikator	Skor
a.	Rasio kas (<i>Cash Ration</i>)	2
b.	Rasio Lancar (<i>Current Ratio</i>)	3
c.	Periode Penagihan Piutang (<i>Collection Period</i>)	2
d.	Perputaran Aset Tetap (<i>fixed asset turnover</i>)	2
e.	Imbalan Atas Aset Tetap (<i>Return Of Fixed Asset</i>)	2
f.	Imbalan Ekuitas (<i>returnn of equity</i>)	2
g.	Perputaran Persediaan (<i>Inventory Turnover</i>)	2
h.	Rasio Pendapatan PNPB terhadap Baya Operasional	4
Total		19

Sumber: Peraturan Dirjen Perbendaharaan Nomor Per 36/PB/2016

Dengan menggunakan instrumen rasio keuangan yang ada dalam Peraturan Dirjen Perbendaharaan Nomor Per-36/PB/2016 kinerja keuangan sebuah BLU dapat diukur dengan total skor dari kinerjanya sehingga dapat memberikan kriteria baik, sedang atau buruk. Berikut ini adalah kriteria dari total skor penilaian aspek keuangan:

Tabel 10. Kriteria total skor penilaian aspek keuangan

Kode grade	Total skor	kriteria
AAA	$TS > 95$	Baik
AA	$80 < TS \leq 95$	
A	$65 < TS \leq 80$	
BBB	$50 < TS \leq 65$	Sedang
BB	$40 < TS \leq 50$	
B	$30 < TS \leq 40$	
CC	$15 < ts \leq 30$	
C	< 15	Buruk

Sumber: Peraturan Dirjen Perbendaharaan Nomor Per 36/PB/2016